

## **PEREMPUAN DALAM PUSARAN POLITIK LOKAL (PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH)**

**SAFITRI MALIK**

Program Studi Administrasi Publik Universitas Pattimura, Ambon

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the role and political participation of women in Pilkada, what factors encourage women to participate in the political process of Pilkada, and what factors inhibit women's political participation in post-conflict local elections in Buru Selatan Regency, Maluku Province.*

*This research is descriptive using a qualitative approach so that to support this research activity, data collection from informants is carried out. Data analysis is preceded by collecting and collecting data or information in the field, after which it is classified according to the type and group, then it is then analyzed or interpreted qualitatively.*

*Based on the analysis, it is known that the role and political participation of women in the post-conflict local election in Buru Selatan Regency, Maluku Province is still lacking. The factors that encourage women to participate in the political process of post-conflict local elections in Buru Selatan Regency, Maluku Province are the existence of policies that open opportunities for women to participate in the flow of government politics as well as the acceptability and local values in South Buru Regency which respect the position of women the same as men. The factors that hindered women's political participation in the post-conflict local election in South Buru Regency, Maluku Province, among others, were factors of education and inadequate experience and interest in political affairs, preferring to be entrepreneurial.*

**Keywords: women, politics, post-conflict local election**

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan partisipasi politik perempuan pada Pilkada, faktor apa yang mendorong perempuan berpartisipasi dalam proses politik Pilkada, serta faktor apa yang menghambat partisipasi politik perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.*

*Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga untuk mendukung kegiatan penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dari informan. Analisis data didahului dengan menghimpun dan mengumpulkan data atau informasi di lapangan, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya, maka selanjutnya dilakukan penganalisaan atau diinterpretasikan secara kualitatif.*

*Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa peran dan partisipasi politik perempuan pada Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku masih kurang. Faktor-faktor yang mendorong perempuan berpartisipasi dalam proses politik Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku adalah adanya kebijakan yang membuka peluang*

*perempuan untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan serta akseptabilitas dan nilai lokal di Kabupaten Buru Selatan yang menghargai posisi perempuan sama dengan laki-laki. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku antara lain adalah faktor pendidikan dan pengalaman yang kurang serta minat dalam urusan politik lebih memilih untuk berwirausaha.*

**Kata Kunci:** *perempuan, politik, Pilkada*

## PENDAHULUAN

Dunia politik tidak mengenal adanya perbedaan antara kaum perempuan dan kaum lelaki, semuanya sama bahkan keduanya saling membutuhkan dan saling mengisi dalam pembangunan, hanya saja terlahir dalam kondrat yang berbeda jenis.

Perjuangan perempuan memperoleh kesetaraan dilakukan di segala bidang, termasuk hak politiknya. Analisis ilmu politik, prosentase perempuan lebih besar dalam komposisi demografi sebenarnya menguntungkan perempuan memperoleh hak politik dan terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Kenyataannya, jumlah anggota legislatif perempuan sangat sedikit.

Kondisi demikian, berhasil mengarahkan kebijakan pemilu yang mendorong peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan. Akhirnya hak politik perempuan dicantumkan pada pasal 65 ayat 1 UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, menyebutkan: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Dipertegas melalui Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang

No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol). Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Pasal 53 menyatakan daftar bakal calon peserta pemilu harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan untuk berkompetisi pada ruang politik dengan pembatasan kuota sebanyak 30 %. Selain itu juga, Indonesia juga salah satu negara yang rata-rata warga negaranya terkhusus kaum perempuan bekerja pada rana public. Berdasarkan hasil Survey Lembaga Indonesia pada periode 2009-2014,

jumlah anggota legislatif perempuan mencapai 101 orang atau 17,86%. Sedangkan pada periode 2014-2019, hanya terdapat 79 orang atau 14% anggota legislatif perempuan dari total 560 orang. Sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif merupakan salah satu contoh kecil yang menunjukkan minimnya keterlibatan perempuan dalam arena politik, khususnya di Indonesia.

Dalam konteks diatas, tentunya ini merupakan gambaran kepada kita bahwa perempuan pada saat ini masih sangat minim untuk ikut serta dalam pemilihan umum di segala level baik daerah maupun pusat. Hal ini tentunya berpengaruh pada keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di negeri ini. Apalagi persoalan perempuan yang begitu kompleks, tentunya perempuan

seharusnya mengambil posisi penting dalam hal ini.

Adapula permasalahan yang kemudian menjadi hambatan tersendiri bagi kaum perempuan dimana sebelum perempuan terlibat aktif di wilayah publik, perempuan lebih banyak beraktivitas di wilayah privat. Padahal, sebagian besar aktivitas politik berada di wilayah publik. Hal ini lah yang menjadi kritik terhadap politik formal, terutama adanya bias gender yang meligitimasi kelemahan kekuasaan politik perempuan. Proses politik yang memisahkan ruang publik dan privat menyebabkan perempuan sulit untuk berpartisipasi dalam politik formal yang sebagian besar berada di wilayah publik.

Dalam konteks politik di Kabupaten Buru Selatan, berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2019

diperoleh gambaran yang kurang lebih sama dengan realitas di atas, dimana ditemukan kenyataan proporsi anggota DPRD laki-laki jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah perempuan yang hanya berkisar pada angka dibawah 30%. Kondisi ini menarik untuk dikaji. Terutama untuk mengetahui peran, bentuk partisipasi politik perempuan di tingkat lokal, khususnya pelaksanaan Pilkada atau Pemilihan Kepada Daerah.

Dari latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Mengidentifikasi peran dan partisipasi politik perempuan pada Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku; 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perempuan berpartisipasi dalam proses politik Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku; dan

3). Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kesetaraan Gender

Menurut Margaret (Leo, 2007:228), Gender merupakan konstruksi sosial. Gender juga sering diartikan sebagai perbedaan-perbedaan sifat, peran, fungsi, tugas, status dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan di konstruksikan oleh masyarakat yang tumbuh dan disepakati dalam masyarakat tersebut serta dapat berubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Secara etimologis, gender berasal dari bahasa Latin (Italia), yaitu *genus*, yang berarti tipe atau jenis.

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori

sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi (Kemenpppa, 2017).

### **Pemilihan Umum dan Pilkada**

Dalam pemilihan kepala daerah terlebih dahulu dipahami adalah pengertian atau definisi dari pemilihan umum (Pemilu), karena Pilkada merupakan bagian dari pemilu yang secara umum memiliki

pengertian yang sama atau hampir sama, namun hanya konteks wilayahnya yang berbeda.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1): “Pemilu ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Selain itu pemilihan umum kepala daerah secara langsung juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, karena melalui pemilihan kepala daerah langsung ini menandakan terbukanya ruang yang cukup agar rakyat bebas memilih pemimpinnya.

### **Partisipasi Politik**

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi.

Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews (2011:56-57)

1) Modernisasi

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada Komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

2) Terjadi perubahan struktur kelas sosial. Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

4) Adanya konflik diantara

pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

- 5) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya. Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Desain Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif (melalui *indepth interview*). Pendekatan survey untuk mengetahui kondisi obyektif peran dan partisipasi politik perempuan dalam Pilkada. *Indepth interview*

untuk mendalami fenomena keterlibatan perempuan dalam proses Pilkada.

### **Informan Penelitian**

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling, yaitu teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala desa perempuan
- b. Anggota DPRD perempuan
- c. Caleg perempuan
- d. Kepala Bagian Umum KPU
- e. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

f. Masyarakat (ibu rumah tangga) jumlah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara observasi dan wawancara, untuk memperoleh data tentang partisipasi perempuan dan Pilkada serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari Kantor Pemerintahan setempat dan KPU terkait data pemilih perempuan.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian

dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku**

Tingkat partisipasi perempuan menggambarkan minat para perempuan-perempuan untuk mulai memberdayakan dirinya termasuk dalam ikut merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan yang nantinya akan berdampak dan memberi kontribusi yang besar bagi daerahnya.

Dari data-data yang peneliti dapatkan, Kabupaten Buru Selatan hingga saat ini masih menampakkan kesenjangan jumlah perempuan-perempuan yang menduduki kursi-kursi politik. Dapat kita lihat misalnya saja dari 81 desa yang ada di Kabupaten Buru Selatan, hanya 3,7% atau hanya 3 desa yang dipimpin oleh perempuan. Bahkan tak satupun kecamatan di Kabupaten Buru Selatan dipimpin oleh seorang perempuan.

Hasil wawancara dengan salah satu kepala desa perempuan yaitu Kepala Desa Waly mengatakan bahwa “Keterlibatan perempuan sebagai kepala desa di Buru Selatan masih sangat perlu ditingkatkan. Karena dalam pemerintahan, partisipasi tenaga dan hasil pemikiran perempuan juga sangat dibutuhkan. (Wawancara, 28 Januari 2021).

Berbeda dengan jabatan struktural, pegawai-pegawai (PNS) di berbagai dinas di Kabupaten Buru Selatan sudah mulai mengalami peningkatan kuantitas. Perempuan yang bekerja sebagai pegawai dinas, badan, instansi maupun sekretariat daerah sudah meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Selatan, kondisi perempuan dalam jabatan politik seperti dalam jabatan kepala desa, caleg dan yang menjadi anggota DPRD di kabupaten Buru Selatan memang masih sangat kurang. Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang sering terjadi merupakan pelanggaran atas asas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, maka dalam kehidupan politik, sosial dan

ekonomi, perempuan Indonesia harus berani melakukan perubahan dan harus bangkit untuk berpartisipasi dalam politik yaitu melalui pemilihan legislatif maupun Pilkada (Wawancara, 29 Januari 2021).

Selain jabatan kepala desa, tentunya salah satu jabatan politik yang sangat penting pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah keterlibatan warga negara sebagai wakil rakyat yang lazimnya disebut sebagai anggota DPR. Perempuan juga memiliki kesempatan dan peluang untuk berpartisipasi merumuskan kebijakan daerahnya. Namun dari data yang peneliti dapatkan, jumlah anggota DPRD perempuan Kabupaten Buru Selatan hanya mencapai 10%. Hanya ada 2 orang dari 20 anggota DPRD (Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru Selatan).

Jadi pada dasarnya secara kuantitas perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Buru Selatan melalui pengamatan penulis sebagai masyarakat kabupaten Buru Selatan, melalui wawancara dari berbagai narasumber serta dari data dan literatur, maka kuantitas/jumlah tersebut dalam partisipasinya menduduki jabatan-jabatan politik masih kurang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BeritaBeta.Com (2020), bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bursel sebanyak 47.076 pemilih.

Ditetapkan jumlah DPT lebih besar dari jumlah Daftar Pemilih

Sementara (DPS) sebelumnya yang hanya berjumlah 46.312 pemilih.

1. DPS Kecamatan Namrole yang semula sebanyak 11.010, meningkat menjadi 11.159 dalam DPT.
2. DPS Kecamatan Leksula yang semula sebanyak 9.243, meningkat menjadi 9.482 dalam DPT.
3. DPS Kecamatan Kepala Madan yang semula sebanyak 7.900, meningkatkan mejadi 7.930 dalam DPT.
4. DPS Kecamatan Fena Fafan yang semula sebanyak 2.384, meningkat menjadi 2.464 dalam DPT.
5. DPS Kecamatan Waesama yang semula sebanyak 9.622, meningkat menjadi 9.819 dalam DPT.

6. DPS Kecamatan Ambalau yang semula sebanyak 6.153, meningkat menjadi 6.222 dalam DPT.

DPT yang telah ditetapkan tersebut merupakan pemilih yang akan menyalurkan hak pilih mereka pada 201 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di 79 Desa se Kabupaten Bursel. Jumlah pemilih laki-laki yang ditetapkan sebagai DPT sebanyak 23.695 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 23.381 pemilih, yang dirinci sebagai berikut:

1. Kecamatan Namrole yang terdiri dari 17 desa memiliki 53 TPS dan memiliki pemilih laki-laki sebanyak 5.634 pemilih dan pemilih perempuan sebanyak 5.525 pemilih.
2. Kecamatan Leksula yang terdiri dari 19 Desa memiliki 40 TPS dan memiliki pemilih laki-laki

sebanyak 4.775 pemilih serta pemilih perempuan sebanyak 4.707 pemilih.

3. Kecamatan Kepala Madan yang terdiri dari 15 Desa memiliki 35 TPS dan memiliki pemilih laki-laki sebanyak 4.064 pemilih serta pemilih perempuan sebanyak 3.866 pemilih.
4. Kecamatan Fena Fafan yang terdiri dari 10 Desa memiliki 12 TPS dan memiliki pemilih laki-laki sebanyak 1.272 pemilih serta pemilih perempuan sebanyak 1.192 pemilih.
5. Kecamatan Waesama yang terdiri dari 11 Desa memiliki 41 TPS dan memiliki pemilih laki-laki sebanyak 4.917 pemilih serta pemilih perempuan sebanyak 9.819 pemilih.
6. Kecamatan Ambalau yang terdiri dari 7 Desa memiliki 20

TPS dan memiliki pemilih laki-laki sebanyak 3.033 pemilih serta pemilih perempuan sebanyak 3.189 pemilih.

Dengan demikian ada peningkatan jumlah DPS ke DPT sebanyak 764 pemilih.

Untuk melihat partisipasi dan minat perempuan dalam jabatan politik, peneliti ingin mengkaji pandangan dan pemahaman dasar perempuan-perempuan di kabupaten Buru Selatan tentang dunia politik. Pandangan perempuan-perempuan mengenai dunia politik tentunya akan berkaitan erat dengan minat mereka melangkah ke dalam politik.

Politik merupakan sebuah seni, sebuah cara dan sebuah kekuatan untuk memperoleh dan mempertahankan sebuah kekuasaan. Keberlangsungan perpolitikan merupakan roda dalam sebuah negara

yang terus menerus berputar untuk mencapai tujuan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya. Jabatan politik memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat.

Salah satu informasi menarik yang peneliti dapatkan dari salah seorang informan kepala desa Mepa dari hasil wawancara menyatakan bahwa, “peran dan partisipasi politik perempuan sebelum Pilkada di Kabupaten Buru Selatan masih kurang, karena pada awalnya masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak bisa terjun ke dalam dunia politik apalagi menjadi pimpinan di suatu wilayah Kabupaten Buru Selatan.” (Wawancara, 5 Pebruari 2021)

Menyimak dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah

satu hal penting untuk memperoleh kekuasaan yaitu memberi pengaruh yang positif pada masyarakat. Politik tidak mengenal perbedaan jenis kelamin tapi lebih kepada kemampuan seseorang dalam memberi pengaruh dan perubahan yang baik pada sebuah daerah.

Menurut salah satu informan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, menyatakan bahwa orang yang bergelut dalam perpolitikan adalah orang yang pintar dan cerdas namun tidak semua menggunakan kecerdasannya untuk mensejahterahkan daerahnya.(Wawancara 04 Pebruari 2021)

Masyarakat saat ini sangat mengharapkan politik yang lebih sehat. Politik tidak hanya berhubungan dengan materi dan kedudukan semata, tetapi merupakan

jalan yang harus digunakan untuk memperbaiki kehidupan bersama bukan hanya kehidupan pribadi ataupun partai yang mengusungnya.

Menurut Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buru Selatan, baik itu negara atau pemerintah sudah memberi peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk berperan dalam arus perpolitikan negara kita tanpa ada deskriminasi seperti zaman dahulu kala ketika perempuan hanya tinggal di rumah saja. Perempuan sekarang sudah banyak yang berpendidikan tinggi, berkualitas dan dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaganya dalam dunia politik.

Sebenarnya untuk pemahaman dasar, perempuan-perempuan sudah banyak yang paham apa itu politik, tapi masih kurang minat mereka

untuk membekalkan dirinya dengan pengalaman dan pengetahuan yang lebih lagi. Karena menurut saya semua harus dimulai dari bawah dulu, paling tidak bergelut dulu dalam organisasi kecil, menjadi pemimpin dalam organisasi kecil, begitu seterusnya sehingga untuk mencalonkan diri jadi bupati atau anggota DPR paling tidak salah satu bekalnya pernah menjadi kepala desa, lurah, camat atau setidaknya pernah memimpin sebuah organisasi. Di Kabupaten Buru Selatan ini masih banyak desa yang cukup tertinggal, itu juga yang menyebabkan masih banyaknya perempuan-perempuan di Buru Selatan yang tidak memiliki pengalaman organisasi, pendidikan politik dan sebagainya.” (Wawancara, 28 Januari 2021).

Beberapa informan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga

memiliki pandangan yang lain bahwa politik itu harus ditopang dengan dana yang besar sehingga mereka enggan untuk terlibat di dalamnya. Menurut mereka lebih baik dana itu digunakan untuk menopang kerja suami dan kehidupan anak dari pada bersaing dalam dunia politik, lebih baik mengurus rumah tangga dari pada mengurus partai.

Satu pandangan dari kutipan diatas yang menarik bahwa perempuan terkadang kurang berminat karena menurutnya politik hanya menghabiskan uang. Politik hanya untuk kalangan elite saja. Meski peluang terus dibuka untuk eksistensi perempuan di bidang politik namun jika pikiran-pikiran yang seperti itu terus menggerogoti para perempuan maka minat akan susah untuk diberdayakan.

Sedangkan menurut seorang caleg bahwa pemikiran yang seperti itu harus dihilangkan karena pengabdian kita sebagai manusia selain untuk suami dan anak juga untuk negara. Negara pada umumnya dan daerah pada khususnya masih membutuhkan peran putri bangsa untuk sama-sama berjuang mencapai kesejahteraan bersama. Menurutnya tidak banyak dana yang dikeluarkan untuk berusaha membekalkan diri dengan pengalaman-pengalaman organisasi yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Motivasi ikut sebagai caleg dengan niat ingin ikut menyumbangkan pemikiran-pemikiran untuk memperbaiki kehidupan daerahnya serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Menurutnya calon perempuan layak dan pantas diperjuangkan karena dalam setiap proses pemilu didukung

oleh persyaratan, dan memiliki kelebihan dalam merebut hati masyarakat (Wawancara, 26 Januari 2021)

Jadi dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan di atas bahwa politik bukan hal yang instan, tapi sebuah kekuatan dan kapabilitas yang diasah terus menerus untuk memperoleh kekuasaan dengan membekalkan diri dengan pengalaman-pengalaman, pemahaman yang matang dan niat yang tulus untuk kesejahteraan bersama.

Dari pernyataan-pernyataan di atas, sedikit gambaran bahwa banyak permasalahan di Kabupaten Buru Selatan yang memang membutuhkan penanganan dan partisipasi perempuan. Tapi ini bukan berarti laki-laki tidak bisa menangani masalah tersebut, hanya saja untuk mencapai kondisi yang ideal dan

seimbang, partisipasi laki-laki dan perempuan berupa sumbangsih pemikiran serta perjuangan mencapai kehidupan yang lebih baik dari semua pelosok daerah sangat dibutuhkan.

Pada dasarnya perempuan memiliki perbedaan kebutuhan dengan laki-laki, aspirasi mereka kiranya lebih dipahami oleh perempuan pula. Maka sangatlah dibutuhkan sosok perempuan bergabung di tengah-tengah laki-laki untuk memikirkan kesejahteraan bersama.

Berbicara tentang kapabilitas untuk terjun dalam dunia politik dan untuk menjadi seorang pemimpin, tentunya hal yang menjadi landasan utama adalah dengan ukuran tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi. Kedua hal ini adalah bekal wajib agar perempuan yang berada

dalam jabatan politik adalah insan-insan yang berkualitas.

Menurut penjelasan tiga orang informan yang masing-masing berprofesi sebagai kepala desa, salah satu hal yang menyebabkan rendahnya kuantitas perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Buru Selatan yakni masih rendahnya tingkat pendidikan kaum perempuan utamanya di pelosok-pelosok desa dibandingkan laki-laki. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa dari 3 Kepala desa perempuan di Kabupaten Buru Selatan, belum ada yang memiliki gelar sarjana hanya berpendidikan SMA.

Menurut kepala desa Waeha Kecamatan Kepala Madan menjelaskan bahwa dirinya menjadi kepala desa pun tidak ditopang dengan tingkat pendidikan, bahkan ia mengaku kurang memiliki

pengalaman-pengalaman organisasi.”  
(Wawancara, 12 Januari 2021)

Dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat bahwa tingkat pendidikan perempuan serta pengalaman organisasi mereka masih sangat kurang untuk meningkatkan kapabilitas sebuah kepemimpinan atau keterlibatan dalam jabatan politik.

Untuk menjadi seorang pemimpin dan pengambil keputusan misalnya untuk menjadi kepala desa atau anggota DPRD, tentunya tidak hanya kemauan atau minat saja, tapi seorang perempuan itu sebaiknya pula ditopang oleh tingkat pendidikan serta pengalaman organisasi yang matang.

Menurut Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan di organisasi atau lembaga-lembaga

swadaya masyarakat memang harus lebih ditingkatkan sebagai sarana untuk belajar mengenal organisasi. Ini merupakan salah satu cara untuk mengasah kapabilitas perempuan. (Wawancara, 28 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan berorganisasi bagi perempuan sangat penting dalam menambah wawasan mereka. Hal tersebut bisa ditempuh ikut serta dalam kegiatan lembaga swadaya masyarakat.

### **Faktor-faktor yang Mendorong Perempuan Berpartisipasi dalam Politik Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku**

Dengan melihat masih adanya partisipasi perempuan dalam politik Pilkada di Kabupaten Buru Selatan tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang peneliti kaji melalui pengamatan, literatur serta hasil wawancara dengan

berbagai informan adalah sebagai berikut:

#### **1. Kebijakan**

Kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan mulai terbuka lebar. Seperti UUD 1945 pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan pemerintahan, INPRES RI No.9 tahun 2000 tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional, serta yang marak dibicarakan saat ini mengenai UU no.10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif pada pasal 53, 54 dan 55 yang menjelaskan pernyataan tentang sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan daerah sebagai salah satu

persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu.

Dalam hal kebijakan tersebut, perempuan telah diberi kesempatan untuk berpolitik demi pembangunan bangsa dan negara. Namun pada kenyataannya peluang tersebut belum digunakan secara maksimal oleh perempuan.

Jadi pada dasarnya, kebijakan-kebijakan yang lahir sangat memberi kontribusi besar untuk membuka peluang perempuan dalam mengembangkan minat dan kualitasnya untuk ikut berjuang dalam kancah perpolitikan.

## **2. Akseptabilitas dan Nilai Lokal di Kabupaten Buru Selatan**

Akseptabilitas masyarakat terhadap perempuan dalam jabatan politik merupakan gambaran akan tingkat penerimaan masyarakat di Kabupaten Buru Selatan terhadap

sosok perempuan dalam perpolitikan.

Sedangkan nilai lokal merupakan sebuah budaya yang dimiliki oleh setiap daerah atau biasa disebut dengan kearifan lokal.

Menurut salah satu narasumber yakni kepala Desa Waly menjelaskan bahwa masyarakat Kabupaten Buru Selatan saat ini sebenarnya sudah siap menerima kehadiran perempuan dalam perpolitikan. Hal ini dibuktikan dengan apresiasi dari warga desa yang mendukung dirinya selama pencalonan sampai masa kepemimpinannya. Menurutnya, masyarakat di Kabupaten Buru Selatan saat ini sepertinya sudah jauh berbeda dari zaman-zaman dahulu kala ketika perempuan lebih banyak dikurung di rumah, tidak sekolah dan dinikahkan di bawah umur. Paradigma tersebut sudah bergeser. Ia

maju sebagai kepala dan memimpin desa ini karena dorongan masyarakat, keluarga, dan tokoh-tokoh masyarakat. (Wawancara, 24 Januari 2021).

Perempuan saat ini telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kehadiran perempuan saat ini dalam jabatan-jabatan politik mendapat dukungan dari masyarakat tanpa ada istilah “deskriminasi”. Dari pernyataan di atas peneliti mendapat sebuah gambaran bahwa di Kabupaten Buru Selatan tidak ada nilai lokal yang mengikat perempuan, namun salah satu nilai lokal bisa menjadi motivasi bagi perempuan.

Menyimak dari hasil wawancara tersebut, pada kenyataannya budaya yang masih menghambat tidaklah berasal dari nilai lokal daerah, tetapi lebih kepada budaya yang masih menggerogoti

cara pandang dan cara berpikir perempuan itu sendiri utamanya yang tinggal di wilayah pedesaan.

### **Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Politik Perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku**

#### **1. Pendidikan dan Pengalaman**

Salah satu faktor yang menghambat kehadiran perempuan di jabatan politik, karena memang mereka kurang melibatkan diri dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sangat sedikit LSM yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan serta dalam pendidikan politik. Ini salah satu hal yang menyebabkan perempuan susah untuk membuka relasi.

Menurut informan lainnya bahwa kualitas atau kapabilitas pendidikan di Kabupaten Buru Selatan khususnya untuk kaum perempuan sebenarnya sudah

mengalami peningkatan namun harus lebih diperhatikan lagi utamanya di pedesaan. Menurutnya, dalam kunjungan ke salah satu desa yakni desa Batu Layar kecamatan Kepala Madan warga perempuan di desa itu jangankan untuk mengerti politik bahkan masih banyak yang buta huruf. (Wawancara, 23 Januari 2021).

Selain dari itu, menurut salah satu informan berpendapat bahwa meski perempuan-perempuan di wilayah perkotaan di Kabupaten Buru Selatan sudah banyak yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi namun sampai saat ini belum pernah ada sosok perempuan yang memiliki pengaruh yang besar di Kabupaten Buru Selatan. Mungkin hal tersebut adalah salah satu alasan mengapa di Kabupaten Buru Selatan masih jarang ada perempuan yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil bupati.

## **2. Minat yang rendah terhadap politik**

Kurangnya minat perempuan dalam berpolitik di Kabupaten Buru Selatan bisa dikatakan berasal dari faktor perempuan itu sendiri yang kurang membekalkan dirinya, kurang percaya diri, karena usaha itu harus diasah dari bawah hingga mencapai puncak.

Umumnya informan menampakkan harapan yang besar supaya perempuan-perempuan di Kabupaten Buru Selatan meningkatkan partisipasinya dalam politik. Menurut mereka jika memiliki bekal organisasi yang matang, serta mendapat dukungan dari lingkungan, untuk apa takut terlibat, karena niat kita untuk ikut terlibat sebagai wakil rakyat atau setidaknya jadi kepala desa, untuk memajukan pembangunan

daerah kita juga. (Wawancara, 28 Januari 2021).

## KESIMPULAN

Peran dan partisipasi politik perempuan pada Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari data-data yang ada serta hasil wawancara dengan berbagai informan yang terlibat dalam jabatan politik serta yang tidak terlibat. Dibandingkan dengan daerah lain maka perempuan di Kabupaten Buru Selatan dalam hal keterlibatan di dunia politik sebagai perumus kebijakan dan pengambil keputusan masih kurang. Begitupula jumlah pemilih perempuan juga masih sedikit dibandingkan laki-laki disebabkan banyaknya keterbatasan perempuan di Kabupaten Buru Selatan.

Faktor-faktor yang mendorong perempuan berpartisipasi dalam

proses politik Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku adalah adanya kebijakan yang membuka peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan mulai terbuka lebar. Seperti UUD 1945 pasal 27 ayat 1 tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan di mata hukum dan pemerintahan, INPRES RI No.9 tahun 2000 tentang peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional, serta yang marak dibicarakan saat ini mengenai UU no.10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif pada pasal 53, 54 dan 55 yang menjelaskan pernyataan tentang sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat dan daerah sebagai salah satu persyaratan parpol untuk menjadi peserta pemilu. Serta akseptabilitas

dan nilai lokal di Kabupaten Buru Selatan yang menghargai posisi perempuan sama dengan laki-laki.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan dalam Pilkada di Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku antara lain adalah faktor pendidikan dan pengalaman, kurangnya minat dalam urusan politik lebih memilih untuk berwirausaha, serta hambatan dalam proses pelaksanaan Pilkada.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Jihan, 2009, Kesetaraan Gender dalam Islam, *Jurnal Musawwa*, Vol. 1 (1), 2009.

Agustina, Heriyani. 2009. *Gender and Politics: Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Ani Widyani Soetjipto. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Anonim, 2017, *Pengertian Pemilu, Tujuan, Fungsi, Asas, Bentuk & Sistemnya*, diakses dari: <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/09/pengertian-pemilu-tujuan-fungsi-asas-bentuk-sistem.html>, pada tanggal 10 Agustus 2020

Budiardjo, Miriam, 2005, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Institute (UNDP & NDI), 2017, *Pemberdayaan Perempuan untuk Partai Politik yang Lebih Kuat, Panduan Praktek Terbaik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan*, Graphics service Bureau, inc. .

KPPI Maluku, 2018, *Partisipasi Perempuan dalam Politik suatu Kecharusan*, diakses dari: <https://www.cengkepala.com/kppi-maluku-partisipasi-perempuan-dalam-politik-sebuah-keharusan/>, tanggal 9 Juli 2020.

Lovenduski, Joni 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius.

- Meydia Nur Rahma, 2018, *Pengertian Gender dan Fungsinya*, diakses dari: <https://www.kompasiana.com/meydanurrohmah/5bb5c48d677ffb63e17156a4/aadg-ada-apa-dengan-gender?page=all>, pada tanggal 20 Juli 2020
- Pudji Astuti, Muhammad Arif Afandi, Handini Listyanti, 2019, *Kajian Peran dan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Timur*, Cakrawala: *Jurnal Litbang Kebijakan*, ISSN 1978-0354, ISSN 2622-013X (Online), Volume 13 Nomor 2 Desember 2019, hal 184-195
- Rasyidin dan Aruni, Fidhia, 2018, *Gender dan Politik ; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Aceh : Unimal Press.
- Sihite Romany. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Siti Nurul Hidayah, 2018, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, diakses dari: <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik> , diakses tanggal 8 Juli 2020
- Sugihastuti. 2007. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2003. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung. Alfabeta.
- Tridewiyanti, Kunthi, 2012, *Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif” (Gender Equality And Justice In Field Of Politics “The Importance Of Participation And Representation Of Women In Legislative”)*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 9 No.1 April 2012
- Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak, 2017, *Gender And Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik*, Sawwa, *Jurnal Studi Gender*, Vol 12 No. 3 2017, ISSN 1978-5623, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,
- UNDP , 2010, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*, Makalah Kebijakan, United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia
- Very Wahyudi, 2018, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*. Politea: *Jurnal*

**Safitri Malik**, Perempuan dalam Pusaran Politik Lokal...

*Politik Islam*, ISSN: 2654-847X, Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, hlm. 63-83

Wurianto, Arif Budi. 2009. *Gender and Politics, Penyiapan Pendidikan Politik bagi Perempuan melalui Pengembangan Kurikulum Berwawasan HAM: Sebuah Perspektif Teori Kritis*. Yogyakarta. Tiara Wacana.